

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telepon (021) 7805814 Faksimile (021) 78844104

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda/Registrasi	:	R.266	Tingkat Keamanan	:	SR/ <input checked="" type="checkbox"/> T/B
Tanggal Penerimaan	:	4/10/2021	Tingkat Kecepatan	:	K/SS/ <input checked="" type="checkbox"/> S/B
Tanggal dan Nomor Surat	:	28/9/2021	050.1.46/3372/Diskominfo-D		
Dari	:	Pj Sekda Prov. Kalbar			
Kepada	:	Ka. BSSN			
Tembusan	:	-			
Ringkasan isi	:	Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda T.A. 2020			
Jumlah	:	32 lembar			

Kepada	Disposisi
1	2
YTH. SU Yth D3 D2	C-1 MUDK 4/10/2021 C-2 Mudk <i>h/10/2021</i> C-3 Sbg bhn evaluasi//051021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Fax. (0561) 730062
PONTIANAK

Kode Pos 78124

Pontianak, 28 September 2021

Kepada

Nomor : 050.1.46 / 3372 /Diskominfo-D
Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil
Pemantauan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan
Persandian Pemda T.A.2020.

Yth. Kepala Badan Siber dan Sandi
Negara

di -
Jakarta

Merujuk Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
Nomor: T.250/BSSN/D2/PP.01.02/08/2021 tanggal 6 Agustus 2021 tentang
Permintaan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Urusan Persandian Pemda Tahun Anggaran 2020, berikut disampaikan
Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan
Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tahun
Anggaran 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

an. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Pj. Sekretaris Daerah,



Tembusan :
Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan).

TERBATAS



**LAPORAN HASIL PEMANTAUAN & EVALUASI
PENYELENGGARAAN URUSAN PERSANDIAN**

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN
2021**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Tujuan	2
BAB II. HASIL EVALUASI PROGRAM KERJA URUSAN PERSANDIAN TAHUN 2020	3
A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan	3
B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	5
C. Kendala dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah	5
BAB III. PROGRAM KERJA TAHUN 2021	7
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	8
A. Kesimpulan	8
B. Saran	8

RAHASIA

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I – KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMDA PROV. KALBAR

LAMPIRAN II – SUMBER DAYA MANUSIA PELAKSANAAN URUSAN PERSANDIAN DI PEMDA PROV. KALBAR

LAMPIRAN III – PERALATAN SANDI DI PEMDA PROV. KALBAR

LAMPIRAN IV – KUNCI SISTEM SANDI DI PEMDA PROV. KALBAR

LAMPIRAN V – ALAT PENDUKUNG UTAMA DI PEMDA PROV. KALBAR

LAMPIRAN VI – SISTEM ELEKTRONIK DI PEMDA PROV. KALBAR

LAMPIRAN VII – PENGELOLAAN DOKUMEN DI PEMDA PROV. KALBAR

LAMPIRAN VIII – LAYANAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMDA PROV. KALBAR

LAMPIRAN IX – POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI DI PEMDA PROV. KALBAR

LAMPIRAN X – DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ ELEKTRONIK DI PEMDA PROV. KALBAR

LAMPIRAN XI – KELENGKAPAN SARANA KERJA DI PEMDA PROV. KALBAR

RAHASIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, bahwa pelaksanaan urusan persandian dilaksanakan oleh seksi Persandian dan Keamanan Informasi, Bidang Persandian dan Statistik, yang berada dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika. Bidang Persandian mempunyai tugas penyiapan, perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah dalam menjalankan tugas tersebut, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. Literasi Dan Pengenalan SMKI/ Sistem Manajemen Keamanan Informasi, melalui kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
 - b. Pembinaan Data Keamanan Informasi se – Kalimantan Barat.
2. Pengujian keamanan sistem elektronik, melalui kegiatan:
 - a. Pengamanan Persandian (JKS/Sanapati)
 - b. Kontra Penginderaan.
3. Perjanjian Kerjasama penerbitan sertifikat elektronik dengan BSrE.

Dalam mencapai tujuan kegiatan tersebut, Bidang Persandian telah didukung dengan Sumber daya dan juga dihadapkan dengan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan kinerja Urusan Persandian dan Keamanan Informasi dalam pengamanan informasi, telah melakukan upaya identifikasi permasalahan dan tindakan perbaikannya sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada.

Komitmen yang tinggi dan pelaksanaan kegiatan yang efektif akan membantu Bidang Persandian untuk mencapai tujuan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, 30 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Kalimantan Barat



BAB I.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mencermati tuntutan akan kebutuhan Teknologi Komunikasi dan Informatika baik secara Nasional maupun Internasional (e-government) benar-benar harus segera diwujudkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana Penyelenggaraan pengamanan persandian sebagai rangkaian kegiatan atau tindakan pencegahan dan penanggulangan dari ancaman dan gangguan Sistem Persandian Negara, dan agar langkah-langkah pengamanan tersebut berjalan secara terencana, terarah dan berkesinambungan perlu adanya *Kerja-sama dengan Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Dalam Menjaga Keamanan Dokumen/ Data Pemerintah Secara Elektronik*, dengan menyelenggarakan *Pengamanan Persandian*, dimana literasi dan pengenalan SMKI atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi menjadi aspek penting, sehingga secara terus-menerus butuh dilakukan *Pembinaan Data Keamanan Informasi se-Kalimantan Barat* semaksimal mungkin, dengan dukungan sumber daya yang ada.

Demikian pula dalam melaksanakan *Kontra Penginderaan, Penarikan Kunci Sisan dan Inventarisasi Permasalahan Persandian di Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat*, serta *Pengenalan Tanda-tangan Elektronik* sebagai rangkaian kegiatan atau tindakan pencegahan dan penanggulangan dari ancaman dan gangguan Sistem Persandian Negara terhadap pihak yang tidak berkompeten, sehingga pada *Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar*, yang ditargetkan diharapkan agar dapat menunjang keberhasilan meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis elektronik (e-government) dalam SPBE / Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

A. DASAR HUKUM

Dasar Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintahan Daerah, adalah:

1. Undang - Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang - Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2019 Tentang Pelayanan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

RAHASIA

6. Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) nomor 10 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklarifikasi Milik Pemerintah.
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
8. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara No.10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
9. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara No.8 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 71 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 120 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 106 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik.
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 14 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 14)
15. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah / DPA-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor: 903/013/DPA-SKPD/BPKPD-B Tahun 2020 Tanggal 4 Januari 2020.

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintahan Daerah bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan persandian dan keamanan Informasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat T.A. 2020;
2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Saran dan solusi Tindak Lanjut terhadap penyelesaian dalam pelaksanaan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II.

HASIL EVALUASI PROGRAM KERJA URUSAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2020.

A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan.

Sesuai Laporan Kegiatan pada Seksi Persandian dan Keamanan Informasi, Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar TA 2020, yang setelah melalui beberapa rasionalisasi dan refocusing anggaran, terdapat 1 (satu) program Peningkatan Layanan Persandian dan 5 (lima) kegiatan, adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama Dengan BSrE Dalam Menjaga Keamanan Dokumen/ Data Pemerintah secara Elektronik.
2. Pembinaan Data Keamanan Informasi se-Kalimantan Barat.
3. Pengamanan Persandian.
4. Kontra Penginderaan.
5. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk *Realisasi Kegiatan* Persandian dan Keamanan Informasi, Diskominfo Prov. Kalbar T.A. 2020, berhasil dilaksanakan 100%, dan tampak pada tabel 2.A.1. berikut:

Tabel 2.A.1. Realisasi Kegiatan
Seksi Persandian & Keamanan Informasi, Diskominfo Prov Kalbar
T.A. 2020

NO	Ruang Lingkup	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	%Capaian
1.	Tata Kelola	1	1	100
2.	Pengawasan	2	2	100
3.	Pembinaan & Evaluasi	2	2	100
		5	5	100

Namun untuk serapan anggarannya dimana 1 (satu) program Peningkatan Layanan Persandian dan 5 (lima) kegiatan, dengan pagu Rp.161.653.000,- dan silpa sebesar Rp.17.621.200,-. Hal ini terjadi karena kebijakan Rasionalisasi atau refocusing oleh Bappeda Prov. Kalbar saat itu berdasarkan prosentase dari seluruh

anggaran pada Diskominfo Prov. Kalbar, dimana jumlah untuk beberapa pos kegiatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana diatur dalam peraturan yang terkait. Walaupun demikian, Realisasi kegiatan urusan Persandian berhasil dilaksanakan 100%.

Untuk *Realisasi Anggaran* Seksi Persandian dan Keamanan Informasi, Diskominfo Prov. Kalbar T.A. 2020, tampak pada tabel 2.A.2, berikut:

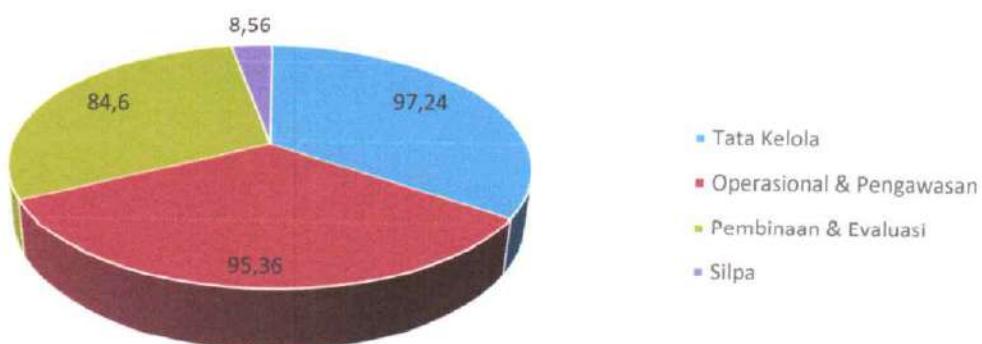
**Tabel 2.A.2. Realisasi Anggaran
Kegiatan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
Diskominfo Provinsi Kalbar T.A. 2020.**

No.	Ruang Lingkup	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	<u>Tata Kelola:</u> Kerjasama dengan BSrE Dalam Menjaga Keamanan Dokumen/Data Secara Elektronik;	Rp.25.607.350,-	Rp.24.901.300,-	97,24
2.	<u>Operasional & Pengawasan:</u> - Kontra Penginderaan; - Pengamanan Persandian;	Rp.8.970.000,- Rp.39.044.320,-	Rp.8.970.000,- Rp.35.426.400,-	=95,36 100 90,73
3.	<u>Pembinaan & Evaluasi:</u> - Pembinaan Data Keamanan Informasi se-Kalbar; - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi diLingkungan Pemprov Kalbar;	Rp.45.707.580,- Rp.42.324.550,-	Rp.42.176.700,- Rp.32.558.200,-	=84,60 92,28 76,93
Keseluruhan Capaian Realisasi Kegiatan.		Rp.161.653.800,-	Rp.144.032.600	91,44
Silpa:		Rp.17.621.200,-		8,56

RAHASIA

Adapun prosentase serapan atau realisasi anggaran kegiatan pada Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Provinsi Kalimantan Barat, tampak pada gambar pie berikut:

Realisasi Anggaran Kegiatan Persandian di Prov. Kalbar



Gambar Diagram 1.

B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan.

Pelaksanaan 1 program kerja yaitu program Peningkatan Layanan Persandian dan 5 kegiatan sebagaimana tersebut pada table-tabel dibawah ini menjadi tugas seksi Persandian dan Keamanan Informasi, pada Bidang Persandian dan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kalbar.

Berdasarkan ruang lingkup nya, kegiatan urusan Persandian dan keamanan Informasi dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan T.A. 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Serapan Anggaran	Capaian Hasil
1.	<u>Tata Kelola:</u> Kerjasama dengan BSrE Dalam Menjaga Keamanan Dokumen/Data Secara Elektronik;	Rp.25.607.350,-	Rp.24.901.300,- (97,24%)	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Serapan Anggaran	Capaian Hasil
2.	<u>Operasional & Pengawasan:</u> - Kontra Penginderaan;	Rp.8.970.000,-	Rp.8.970.000,- (100%)	100%
	- Pengamanan Persandian;	Rp.39.044.320,-	Rp.35.426.400,- (90,73%)	100%

RAHASIA

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Serapan Anggaran	Capaian Hasil
3.	<u>Pembinaan & Evaluasi:</u> -Pembinaan Data Keamanan Informasi se-Kalbar;	Rp.45.707.580,-	Rp.42.176.700,- (92,28%)	100%
	-Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi diLingkungan Pemprov Kalbar;	Rp.42.324.550,-	Rp.32.558.200,- (76,93%)	100%

C. Kendala dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah.

**Tabel 2.C. Kendala dan Rencana Tindak Lanjut
Urusan Persandian dan Keamanan Informasi TA 2020.**

No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah
I.	<i>Tata Kelola:</i>	
1.	Kerjasama dengan BSrE Dalam Menjaga Keamanan Dokumen/Data Secara Elektronik; <u>-Secara umum</u> tidak ada kendala. <u>-Kendala</u> nya pada realisasi anggaran atau serapan anggaran sebesar 97,24%. <u>-Alasan</u> nya Rasionalisasi oleh Bappeda Prov. Kalbar, berdasarkan prosentase sehingga jumlah yang ada sedemikian rupa tidak cukup untuk dapat dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku.	Menyarankan kepada Bappeda Prov. Kalbar: agar Rasionalisasi berdasarkan perhitungan sesuai aturan, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku.
II.	<i>Operasional & Pengawasan:</i>	
2.	Kontra Penginderaan; <u>-Secara umum</u> , tidak ada kendala karena Tim BSSN mendukung. <u>-Kendala</u> : belum tersedianya alat untuk kegiatan tsb.	Rencana pembelian alat untuk dukung kegiatan Kontra Penginderaan secara mandiri.
3.	Pengamanan Persandian; <u>-Secara umum</u> tidak ada kendala. <u>-Kendala</u> nya pada realisasi anggaran atau serapan anggaran sebesar 90,73%. <u>-Alasan</u> nya Rasionalisasi oleh Bappeda Prov. Kalbar, berdasarkan prosentase sehingga jumlah yang ada sedemikian rupa tidak cukup untuk dapat dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku.	Menyarankan kepada Bappeda Prov. Kalbar: agar Rasionalisasi berdasarkan perhitungan sesuai aturan, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku.
III.	<i>Pembinaan & Evaluasi:</i>	
4.	<u>-Pembinaan Data Keamanan Informasi se-Kalbar;</u> <u>-Secara umum</u> tidak ada kendala. <u>-Kendala</u> nya pada realisasi anggaran atau serapan anggaran sebesar 92,28%.	Menyarankan kepada Bappeda Prov. Kalbar: agar Rasionalisasi berdasarkan perhitungan sesuai aturan, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku.

RAHASIA

No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah
	-Alasan nya Rasionalisasi oleh Bappeda Prov. Kalbar, berdasarkan prosentase sehingga jumlah yang ada sedemikian rupa tidak cukup untuk dapat dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku.	
5.	<ul style="list-style-type: none"> -Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi diLingkungan Pemprov Kalbar; -<u>Secara umum</u> tidak ada kendala. -<u>Kendala</u> nya pada realisasi anggaran atau serapan anggaran sebesar 76,93%. -Alasan nya Rasionalisasi oleh Bappeda Prov. Kalbar, berdasarkan prosentase sehingga jumlah yangada sedemikian rupa tidak cukup untuk dapat dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku. 	Menyarankan kepada Bappeda Prov. Kalbar: agar Rasionalisasi berdasarkan perhitungan sesuai aturan, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku.

BAB III. PROGRAM KERJA TAHUN 2021.

Sesuai Rencana Kegiatan Program Kerja Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika urusan Persandian dan Statistik, pada Seksi Persandian dan Keamanan Informasi, serta setelah beberapa kali Rasional dan Refocusing Anggaran terdapat 1 (satu) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dan 1 (satu) kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, dengan 2 (dua) sub kegiatan, Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu: 3 (tiga) output dan outcome; dan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan 4 (empat) output dan outcome, sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 3. Program Kegiatan Urusan Persandian T.A. 2021.

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Waktu Penyelesaian
	Program: Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Kegiatan: Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.		
	Sub Kegiatan: 1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.	Rp.59.993.413.-	Januari s.d Desember
	Output: 1. Terlaksana nya Pembinaan Pengamanan Data Informasi dan Komunikasi Keamanan Informasi di Kalimantan Barat.		2 Bulan

RAHASIA

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Waktu Penyelesaian
	2. Terlaksana nya Pembinaan Data Keamanan Informasi se-Kalbar untuk mendukung Indeks KAMI.		
	3. Terlaksana nya Sterilisasi Tempat Strategis untuk Pengamanan Informasi Daerah.		4 Bulan
	Sub Kegiatan: 2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.	Rp.147.090.555,-	Januari s.d Desember
	Output: 1. Terbentuk dan beroperasinya Tim Security Operation Center.		10 Bulan
	2. Terlaksananya Pembinaan dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Persandian/ Sanapati perangkat Daerah.		12 Bulan
	3. Terlaksana nya Penyelenggaraan Dukungan Persandian untuk Informasi Daerah.		1 Bulan
	4. Terselenggaranya Kerjasama dengan BSrE dalam penerbitan Tanda Tangan Digital di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.		1 Bulan

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.

1. Kesimpulan.

Pelaksanaan program kerja urusan persandian tahun anggaran 2020 di Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan dengan baik yakni sebagai berikut:

1. Program kerja urusan persandian tahun anggaran 2020 sebanyak 5 (lima) kegiatan;
2. Pencapaian indikator kinerja utama bidang persandian tercapai sebanyak 100%;
3. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 144.032.600,- (91,44%) dari Rp.161.653.800,- ;
4. Realisasi Kegiatan untuk 5 kegiatan telah dilaksanakan 100%.

2. Saran.

Agar pelaksanaan program kerja urusan persandian dapat mencapai target, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi, Bidang Persandian dan Statistik, Dinas Kominfo Prov. Kalbar menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Kementerian Dalam Negeri:

Kepada Yth Bp Kementerian Dalam Negeri.

Kami sangat berterima-kasih atas dukungan dan pengertian yang besar terhadap kebijakan kesejahteraan Jabatan Fungsional Sandiman dan Manggala Informatika, yang masih langka di Pemda Provinsi Kalimantan Barat, serta Pendidikan atau pelatihan bersertifikat yang akan sangat kami butuhkan untuk menambah kinerja kami.

2. Untuk Badan Siber dan Sandi Negara:

Kepada Yth: Ka BSSN.

Kami sangat berterima-kasih kepada seluruh Tim BSSN atas dukungan yang besar, terutama terhadap:

- Pelaksanaan Kegiatan Kontra Penginderaan, sehingga kami dapat menyelenggarakan pengamanan informasi terkait penyadapan yang diduga mungkin terjadi.
- Pelatihan dan Bimbingan Teknis online bersertifikat yang akan sangat kami butuhkan untuk menambah skill, wawasan, dan kinerja kami.

RAHASIA

3. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar:

Kepada Yth: Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

Kami sangat berterima-kasih untuk dukungan dan pengertian selama ini. Karena komitmen pimpinan untuk meyelenggarakan SPBE sebagai program prioritas dan meningkatkan awarness terhadap aspek keamanan menjadi sangat penting dalam mempercepat terwujudnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terencana, berkesinambungan dan terintegrasi. Saat Laporan ini dibuat, Urusan Persandian dan Keamanan Informasi masih dilaksanakan oleh Seksi Persandian dan Keamanan Informasi, serta dukungan 1 orang JF Pranata Komputer, 1 orang JF Sandiman Ahli Pertama (CPNS) dan 1 orang JF Sandiman Penyelia (yang sangat senior).

Dua tugas besar yang serumpun tetapi berbeda fokus tugas-fungsinya, yaitu Persandian (JF Sandiman) dan Keamanan Informasi (JF Manggala Informatika) yang lebih fokus pada SMKI atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Demikian Laporan "Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda Provinsi Kalimantan Barat T.A. 2020" ini disusun agar dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Pontianak, 30 Agustus 2021

**Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat**



**SAMUEL, SE, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 196604081993031009**

LAMPIRAN I

DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Judul Dokumen Kebijakan/Prosedur Keamanan Informasi	Deskripsi Singkat	Tahun Terbit	Revisi ke - / Tahun
1	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 120 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelayanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Acuan tatacara pelayangan pengamanan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	2019	-
2	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 106 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik	Mengatur tentang regulasi dan pemanfaatan sertifikat elektronik	2020	-

Pontianak, 30 Agustus 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat



Samuel, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196604 08 199303 1 009

LAMPIRAN II

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA PELAKSANAAN URUSAN PERSANDIAN
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORM KELENGKAPAN PERSONIL SDM SANDI KEAMANAN INFORMASI (PENGAMANAN SISTEM ELEKTRONIK)

A. DATA PRIBADI

NO	NAMA	NOMOR TELEPON (KANTOR)	EMAIL
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Agus Hasim, S.T., M.Si	085350802248	agus.hasim@kalbarprov.go.id
2	Sylvia Josepha Maria Pessy, S.I.P	085845620625	Sylvia.pessy@kalbarprov.go.id
3	Sugeng Widodo	081345205247	sugeng.widodo@kalbarprov.go.id
4	M. Ferry Sutriana, A.Md	085659020663	manaka354@kalbarprov.go.id
5	Ratna Juwita	089633174750	-
6	Rio Fiorido Panggabean, S.T	085845162654	rio.fiorido@kalbarprov.go.id

B. DATA PEKERJAAN

NO	NIP/NRP	PANGKAT/GOL. RUANG	TMT		JABATAN	TMT	
			BULAN	TAHUN		BULAN	TAHUN
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	19660824 199803 1 006	Pembina Utama Madya (IV/a)	April	2014	Kabid Persandian dan Statistik	Juni	2021
2	19690218 198903 2 005	Pembina Utama Madya (IV/a)	Oktober	2015	Kasi Persandian dan Keamanan Informasi	Agustus	2019
3	19661202 198909 1 002	Penata (III/c)	Oktober	2013	Sandiman Peyelia	Januari	2017
4	19881203 201101 1 002	Penata Muda TK.I (III/b)	Oktober	2019	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Agustus	2019
5	19710405 199303 2 005	Penata Muda TK.I (III/b)	Oktober	2014	Pengelola Data Persandian	Desember	2020
6	19931028 202012 1 014	Penata Muda (III/a)	Januari	2021	Sandiman Ahli Muda	Januari	2021

C. DATA PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN		PELATIHAN DIBIDANG KEAMANAN INFORMASI/PERSANDIAN		SERTIFIKASI DIBIDANG KEAMANAN INFORMASI	
	JENJANG	TAHUN LULUS	NAMA PELATIHAN	TAHUN	NAMA SERTIFIKASI	TAHUN
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	S2	2008	-	-	-	-
2	S2	2003	1. Cyber Security Drill Test II Sektor Pemerintahan Daerahnht 2019 BSSN	2019	-	-
			2. Bimtek IKAMI	2020		
3	SMA	1987	1. DSD	1994	SANAPATI	2020
			2. OTP Elektronik JKS Kemendagri Pemda	2014		
			3. Workshop Tim Penilai 2F Sandiman	2014		
			4. Diklat Counter Sirveillance – Pusdiklat Lembaga Sandi Negara	2009		
4	D3	2009	1. Bimtek IKAMI	2020		
			2. Diklat Teknis Security Operation Center (SOC)	2021		
5	SMA	1990	-	-	-	-
6	S1	2016	-	-	-	-

D. DATA PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENGHARGAAN

NO	PENGHARGAAN PERSANDIAN ATAU KEAMANAN INFORMASI		TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN		TUGAS LAIN DILUAR URUSAN PERSANDIAN
	NAMA PENGHARGAAN	TAHUN	DAPAT	TIDAK DAPAT	
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	-	-	✓	-	-
2	-	-	✓	-	-
3	-	-	✓	-	-
4	-	-	✓	-	-
5	-	-	✓	-	-
6	-	-	-	✓	-

Pontianak, 30 Agustus 2021

Mengetahui,
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

 Provinsi Kalimantan Barat



Samuel, S.E., M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196604 08 199303 1 009

LAMPIRAN III

DAFTAR PERALATAN SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA PALSAN	JUMLAH	NOMOR SERI	NUP	POSISI	PENGADAAN		BAST		KONDISI (B/R)	KESIAPAN OPS	PENGGUNAAN
						INSTANSI	TAHUN	NOMOR	TANGGAL		SO/TO	(AG/TG)
1	Hg C-52	1	1502051		Kasa					B	SO	
2	Hg C-52	1	29216		Kasa					B	SO	
3	Hg C-52	1	29969		Kasa					B	SO	
4	Hg C-52	1	29213		Kasa					B	TO	
5	Hg C-52	1	1500286		Kasa					B	SO	
6	Notebook Hp Probook 4431s	1	CNU1284HQ8	1178	Kasa	LEMSANEG	2012			B	SO	
7	Kriptosoft Pro	1	3213	14045	Kasa	LEMSANEG	2010			B	SO	
8	Jammer	1	S07714	31409	Kasa	LEMSANEG	2013	R.BA.127/LSN/PP.06.02/09/2015		B	SO	
9	Kriptophone Nokia E7	1	306020700422777		Kasa	LEMSANEG	2012	R.BA.127/LSN/PP.06.02/09/2015		B	TO	
10	Kriptophone Nokia E7	1	306020700422776		Kasa	LEMSANEG	2012	R.BA.127/LSN/PP.06.02/09/2015		B	TO	
11	Kriptophone Nokia E7	1	30602070422699		Kasa	LEMSANEG	2012	R.BA.127/LSN/PP.06.02/09/2015		B	TO	
12	Kriptophone Nokia E7	1	306020700422686		Kasa	LEMSANEG	2012	R.BA.127/LSN/PP.06.02/09/2015		B	TO	
13	Kriptophone Nokia E7	1	306020700422880		Kasa	LEMSANEG	2012	R.BA.127/LSN/PP.06.02/09/2015		B	TO	
14	Kriptophone Nokia E7	1	306020700422933		Kasa	LEMSANEG	2012	R.BA.127/LSN/PP.06.02/09/2015		B	TO	

NO	NAMA PALSAN	JUMLAH	NOMOR SERI	NUP	POSISI	PENGADAAN		BAST		KONDISI (B/R)	KESIAPAN OPS	PENGGUNAAN
						INSTANSI	TAHUN	NOMOR	TANGGAL		SO/TO	(AG/TG)
15	Kriptophone Nokia E7	1	306020700422984		Kasa	LEMSANEG	2012	R.BA.127/LSN/PP.06.02/09/2015		B	TO	
16	Kriptophone Nokia E7	1	306020700422676		Kasa	LEMSANEG	2012	R.BA.127/LSN/PP.06.02/09/2015		B	TO	
17	Kriptophone Nokia E7	1	306020700423000		Kasa	LEMSANEG	2012	R.BA.127/LSN/PP.06.02/09/2015		B	TO	
18	Kriptophone Nokia E7	1	306020700422676		Kasa	LEMSANEG	2012	R.BA.127/LSN/PP.06.02/09/2015		B	TO	
19	Kriptophone Nokia E7	1	306020700423000		Kasa	LEMSANEG	2012	R.BA.127/LSN/PP.06.02/09/2015		B	TO	
20	Kriptophone Nokia E7	1	306020700422676		Kasa	LEMSANEG	2012	R.BA.127/LSN/PP.06.02/09/2015		B	TO	
21	Dongle Secure x	1	140321AA20009H	367A1B44	Kasa	BSSN	2021			B	SO	

Pontianak, 30 Agustus 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat



Samuel, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196604 08 199303 1 009

LAMPIRAN IV

DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI

DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	PALSAN	KUNCI SISTEM SANDI										KET	
		MANUAL KEY		JML	PRODUKSI		BAST		MASA BERLAKU				
		NAMA BUKU	NO.KUNCI		PRODUSEN	THN	NOMOR	TGL	BB	SB	TB		
1	Kriptosoft	PATRON	AA1140217										
2	Kriptosoft	ARUMBA	AA1040217										

Pontianak, 30 Agustus 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat



Samuel, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196604 08 199303 1 009

LAMPIRAN V

DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA APU	NOMOR SERI	NUP	JML	POSISI	PENGADAAN		BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)		KONDISI	PENGUNAAN	K E T
						INSTANSI	THN	NOMOR	TGL			
1	Brankas			1	Kasa	PEMPROV				B		
2	Lemari Besi			1	Kasa	PEMPROV				B		
3	Paper Shredder			1	Kasa	PEMPROV				B		
4	Signal Analyzer – PBSA8G	A516472219	73	1	BSSN	BSSN	2019	046/025/DISKOMINFO -D	10	R		

Pontianak, 30 Agustus 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat



Samuel, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196604 08 199303 1 009

LAMPIRAN VI

**DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO	NAMA SISTEM ELEKTRONIK	KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK (STRATEGIS/TINGGI/RENDAH)	PENGELOLA SISTEM ELEKTRONIK	BENTUK PENGAMANAN MINIMAL YANG SUDAH TERPASANG	UJI KEAMANAN SISTEM ELEKTRONIK		PELAKSANAAN REKOMENDASI HASIL UJI (DALAM BENTUK PERSENTASE)		
					PELAKSANA	TAHUN	TELAH	SEDANG	BELUM
1	Kalbar Prov Webmail	RENDAH	DISKOMINFO	WAF, SSL (Secure Socket Layer)	-	-	-	-	-
2	Open Data Portal Kalbar	RENDAH	DISKOMINFO	WAF (Windows Application Firewall)	-	-	-	-	-
3	Datacloud Kalbar	RENDAH	DISKOMINFO	WAF, SSL (Secure Socket Layer)	-	-	-	-	-
4	KAPUAS (Aplikasi Pendukung Administrasi Surat)	RENDAH	DISKOMINFO	WAF (Windows Application Firewall)	-	-	-	-	-
5	e-Activity	RENDAH	DISKOMINFO	WAF, SSL (Secure Socket Layer)	-	-	-	-	-
6	e-Presensi	RENDAH	DISKOMINFO	WAF, SSL (Secure Socket Layer)	-	-	-	-	-
7	SIBOWAL	RENDAH	DISKOMINFO	WAF (Windows Application Firewall)	-	-	-	-	-
8	Website Diskominfo	RENDAH	DISKOMINFO	WAF, SSL (Secure Socket Layer)	-	-	-	-	-
9	e-Tracking	RENDAH	DISKOMINFO	WAF (Windows Application Firewall)	-	-	-	-	-

Pontianak, 30 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat



LAMPIRAN VII

DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Ketersediaan Prosedur Pengelolaan Dokumen

No	Prosedur	Ketersediaan		Identitas Prosedur	Tahun Terbit	Tahun Terakhir Revisi
		Ada	Tidak Ada			
1	Klasifikasi Informasi	✓		SK (masih dalam proses)	2020	
2	Jadwal Retensi Arsip	✓		Ada dalam SK Klasifikasi		
3	Pemusnahan Arsip	✓		Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 117 Tahun 2019	2019	
4	Permintaan Informasi/Dokumen	✓		SOP, tanda terima, tindak lanjut	2020	
5	Distribusi informasi/dokumen		✓			

2. Pemusnahan Dokumen

No.	Dokumen Yang Dimusnahkan	Berita Acara		Pelaksana Pemusnahan
		Nomor Berita Acara	Tanggal	
1	Nihil			
Dst.				

Pontianak, 30 Agustus 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat



Samuel, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 196604081993031009

LAMPIRAN VIII

DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Bentuk Layanan	Tahun	Penerima Layanan		
			Masyarakat*	Pegawai**	Perangkat Daerah***
1	Pengiriman surat melalui email sanapati		-	✓	✓
2					
3					

Keterangan:

*Dengan menyebutkan kelompok masyarakat, misal sekolah, atau jika masyarakat secara luas, cukup ditulis "Umum"

**Dapat menyebut perangkat daerah dimana pegawai tersebut berdinas, jika keseluruhan pegawai, cukup ditulis "Pegawai Pemda"

***Dengan menyebutkan nama perangkat daerahnya.

Pontianak, 30 Agustus 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat



Samuel, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196604 08 199303 1 009

LAMPIRAN IX

DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Nama JKS*	Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terhubung	Media Komunikasi	Peralatan Sandi yang digunakan
1	Nihil			
2				
3				
Dst.				

Keterangan:

*JKS Internal Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar perangkat daerah atau JKS Internal Perangkat Daerah yang menghubungkan unit kerja didalam perangkat daerah.

Pontianak, 30 Agustus 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat



Samuel, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196604 08 199303 1 009

LAMPIRAN X

**DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No	Nama Aplikasi Persuratan	Pihak yang terhubung			Bentuk Pengamanan yang sudah terpasang	Media Akses		Jaringan Akses	
		TU Perangkat Daerah	Es 1 dan Es 2	Semua Pejabat		Smartphone	PC/Laptop	Intranet	Internet
1	e-Tracking	✗	✓	✗	WAF	✓	✓	✗	✓
2	KAPUAS (Aplikasi Pendukung Administrasi Surat)	✓	✓	✓	WAF	✓	✓	✗	✓

Pontianak, 30 Agustus 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat



LAMPIRAN XI

**DAFTAR KELENGKAPAN SARANA KERJA
DI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No	Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
1	Sarana Kerja Adminisrasi		
	a. Sarana Pengolah Data		
	- Desktop	3	Baik
	- Laptop	2	Baik
	- Scanner	1	Baik
	b. Sarana Penyimpan Data		
	- Hardisk	2	Baik
	- Flashdisk	2	Baik
	- CD	1	Baik
	- Box File	2	Baik
	- Brankas	1	Baik
	- Filling Cabinet	1	Baik
	- Lemari	1	Baik
	c. Sarana Komunikasi		
	- Telepon	1	Baik
	- Faksimili	1	Baik
	- Sarana Internet	1	Baik
	- Radio	-	-
	d. Sarana Pencetak		
	- Printer	2	Baik
	- Mesin Foto Copy	-	-
	e. Sarana Tulis Menulis		
	- Ballpoint	6	Baik
	- Pensil	2	Baik
	- Penghapus	1	Baik
	- Spidol	2	Baik
	- Buku Kerja	2	Baik

No	Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
	<ul style="list-style-type: none"> - Papan Tulis f. Sarana Penghancur Data - Alat Penghancur Kertas - Palu - Sarana Pembakaran - Gunting - 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 - - - 2 - 	<ul style="list-style-type: none"> - Baik - - - Baik -
2	Sarana Kerja Kasa <ul style="list-style-type: none"> - Bahan Sandi - Telepon SLJJ - Faksimili - Sarana Internet - Jaringan Telepon 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 1 1 	<ul style="list-style-type: none"> - - - Baik Baik
3	Sarana Strong Room <ul style="list-style-type: none"> - Tabung Pemadam Kebakaran - Telepon PABX (antara strong room dan Kasa) 	<ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> - -
4	Sarana Pendukung <ul style="list-style-type: none"> - Meja Kerja - Kursi Kerja - Generator Listrik - Penerangan darurat - Pengatur Suhu - Genset Portable - Tempat Sampah - Kalender - Jam dinding 	<ul style="list-style-type: none"> 4 5 - - - - - 1 - 	<ul style="list-style-type: none"> Baik Baik - - - - - Baik -
5	Sarana Pengamanan Fisik <ul style="list-style-type: none"> a. Pengamanan Akses Kontrol - Otentifikasi Berbasis Informasi yang Diketahui (Password/PIN) 	<ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> - -

No	Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
	<ul style="list-style-type: none"> - Otentikasi Berbasis Informasi yang Dimiliki (smart card/token) - Otentikasi Berbasis Informasi yang Natural ada pada Pengguna (finger print, iris scan, voice scan) - tanda pengenal (ID card) 	-	-
	b. Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> - Sensor Pendekksi Api (fire detector) - Alarm Kebakaran - Automatic Sprinkle System - Tabung Pemadam Api 	-	-
	c. Pengamanan Terhadap Bahaya Penyusup	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> - Kamera Monitor (CCTV) - Piket Jaga 	-	-

Pontianak, 30 Agustus 2021

Mengetahui,
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Provinsi Kalimantan Barat



Samuel, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya
 NIP. 19660408 199303 1 00